

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran untuk Tim Gubernur Naik Lagi

### Dewan kesulitan mengawasi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

#### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** – Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 21,22 miliar bagi penyelenggaraan tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada tahun depan. Alokasi anggaran itu naik dibanding anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 18,9 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra, mengatakan penambahan anggaran itu diperlukan untuk penyesuaian gaji anggota TGUPP. Contohnya, ada anggota TGUPP yang lulus pendidikan S2 dengan pengalaman kerja sepuluh tahun, tapi gaji yang diterima sama dengan anggota lain tamatan S1 berpengalaman kerja lima tahun. "Untuk penyesuaian hak keuangan sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya," ujar dia, Jumat lalu.

Alokasi anggaran TGUPP ini selalu meningkat dari

**“Karena TGUPP kan melekat dengan gubernur, kepala dinas dan kepala biro pasti takut kepada TGUPP.”**

#### Gembong Warsono

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta

tahun ke tahun. Pada 2018, misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,02 miliar. Setahun kemudian, anggaran menjadi Rp 18,99 miliar.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, kinerja anggota TGUPP sepenuhnya dimonitor dan dievaluasi oleh gubernur. Evaluasi itu dilakukan secara periodik melalui ketua TGUPP. Sedangkan penilaian prestasi kerja bagi anggota TGUPP yang berasal dari pegawai negeri akan disesuaikan dengan aturan. "TGUPP itu bertanggung jawab kepada gubernur dan itu sudah ada ketentuannya," kata Mahendra.

Menurut Mahendra, TGUPP bertugas membuat laporan sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh gubernur. Laporan itu juga ditembuskan kepada Bappeda. "Berdasarkan laporan itulah diberikan gaji," katanya. Selain itu, anggota TGUPP wajib mengisi presensi. Jumlah kehadiran kerja itu menjadi salah satu variabel untuk menghitung

gaji anggota TGUPP.

Ketua TGUPP, Amin Subekti, mengatakan anggaran TGUPP bertambah demi menunjang kebutuhan operasional dan kinerja timnya. Apalagi pada tahun depan kegiatan strategis daerah juga mulai berjalan. "TGUPP akan *monitoring* lebih banyak, sehingga anggaran yang dibutuhkan lebih banyak," ujarnya.

Amin menjelaskan, TGUPP saat ini berjumlah 65 anggota yang masuk dalam bidang percepatan pembangunan, pencegahan korupsi, pengelolaan pesisir, serta respons strategis. Keempat bidang itu memiliki tugas masing-masing untuk membantu gubernur menerjemahkan visi dan misi. "Soal honorarium, TGUPP terbuka sekali," katanya.

Menurut Amin, kinerja TGUPP bisa dilihat dari progres dalam menyelesaikan 73 kegiatan strategis daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah DKI. Contohnya kegiatan strategis daerah untuk program JakLingko, di mana saat ini 64,41 persen trayek ang-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran untuk Tim Gubernur Naik Lagi

### Disorot Dewan

kutan umum sudah masuk program tersebut. Bahkan revitalisasi angkutan umum juga sudah berjalan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan Dewan kesulitan mengawasi kinerja TGUPP. Padahal, gaji anggota TGUPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. "Tangan kami enggak sampai untuk mengawasi TGUPP," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Gembong menyarankan agar anggaran TGUPP diambilkan dari dana operasional gubernur, bukan dari APBD. Pembiayaan semacam itu sebelumnya telah dilakukan oleh

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

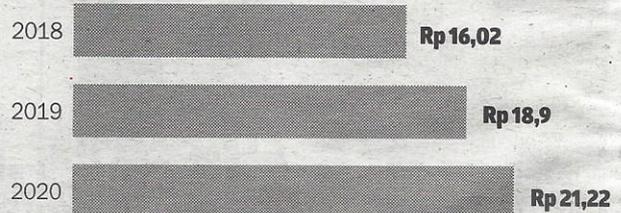
Gembong juga permasalahan tingkat kepercayaan gubernur kepada tim TGUPP yang begitu besar, sehingga gubernur lebih mempercayai rekomendasi dari TGUPP dibanding dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Karena TGUPP kan melekat dengan gubernur, kepala dinas dan kepala biro pasti takut kepada TGUPP," katanya.

Amin menyanggah hal itu. Menurut dia, TGUPP dan SKPD saling melengkapi dan mendukung untuk melaksanakan visi dan misi gubernur. "Tidak ada yang lebih kuat dari salah satunya," katanya. ●

**K**INERJA Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kembali menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Sebab, pemerintah DKI mengusulkan penambahan anggaran bagi tim tersebut pada tahun depan. "Kami akan kritisi peningkatan anggaran TGUPP saat rapat Badan Anggaran," kata anggota DPRD dari PDI Perjuangan, Gembong Warsono, Jumat lalu.

Berikut ini anggaran TGUPP dari tahun ke tahun:

#### Alokasi Anggaran (Miliar):



#### Tugas TGUPP, antara lain:

- » Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur.
- » Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur.
- » Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur.
- » Melaksanakan pendampingan program prioritas gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- » Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur.

#### Gaji di TGUPP (juta):

